



**OVERVIEW PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA DJP, DJPK, DAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA**

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH PUSAT

1. Kewajiban penyampaian data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP oleh instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pentingnya pelaksanaan pertukaran data perpajakan antarfiskus pusat dan daerah untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) saat ini masih terbatas.
3. Perlunya solusi segera dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak Pusat.

Selaras dengan stranas pencegahan korupsi sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

PEMERINTAH DAERAH

1. Penerimaan Pajak Daerah masih rendah.
2. Pentingnya pelaksanaan pertukaran data perpajakan antarfiskus pusat dan daerah untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) saat ini masih terbatas.
3. Kontribusi pemda dalam rangka pemenuhan informasi terkait data perpajakan Pusat masih kurang.
4. Pemda kesulitan mendapatkan data pembanding WP pusat (dari DJP) untuk menguji tingkat kepatuhan WP daerah.
5. Perlunya solusi segera dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Tahap Perluasan Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah



KEPUTUSAN BERSAMA

1

Kepber ditandatangani tanggal 8 April 2019 oleh Dirjen Pajak dan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-126/PJ/2019 dan KEP-17/PK/2019

2

Kepber selanjutnya diubah melalui Keputusan Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Perimbangan Keuangan No. KEP-350/PJ/2020, KEP-41/PK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-126/PJ/2019 dan Nomor KEP-17/PK/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah tanggal 30 Juli 2020.



PERJANJIAN KERJA SAMA

1

PKS tahap I telah ditandatangani pada tanggal 16 Juli 2019 oleh DJP, DJPK, dan 7 Pemda kota pilot.

2

Sebagai perluasan terhadap manfaat dari kegiatan ini, pada tanggal 26 Agustus 2020 telah dilaksanakan penandatanganan PKS tahap II antara DJP, DJPK, dan 78 Pemda (3 Provinsi, 47 Kabupaten, dan 28 Kota).

3

Selanjutnya, di tahun 2021 kembali dilaksanakan perluasan PKS untuk tahap III dengan seremoni penandatanganan yang pada tanggal 21 April 2021 (1 Propinsi, 68 Kabupaten dan 15 Kota)



DJP – Dit PKP



DJPK – Dit KPT



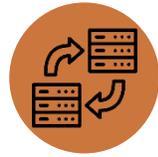
PEMDA

Maksud dan Tujuan

Maksud Perjanjian Kerja Sama

mengoptimalkan pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan masing-masing pihak dalam bentuk kegiatan bersama sebagai bagian dari proses teknis administrasi Perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

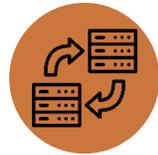
Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:



mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Perpajakan serta data perizinan, serta data/atau informasi lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



mengoptimalkan pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Perpajakan



mengoptimalkan penyampaian data IKD



meningkatkan Pendampingan dan dukungan kapasitas kepada para pihak di bidang Perpajakan



mengoptimalkan pelaksanaan Pengawasan Bersama atas Wajib Pajak



meningkatkan pengetahuan aparatur/SDM para pihak di bidang perpajakan



Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama:



Pembangunan data Perpajakan yang berkualitas



Pelaksanaan **pertukaran data** perpajakan



Pemanfaatan data dan/atau informasi pajak atas pengusaha dan WP yang ditetapkan secara berkala yang telah disepakati



Pelaksanaan Pengawasan Bersama di bidang Perpajakan



Pelaksanaan KSWP



Koordinasi dalam penyusunan regulasi Pajak Daerah



Pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan daerah



dukungan kapasitas dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan daerah serta Sosialisasi Perpajakan secara terpadu



mendukung program pemerintah dalam **upaya pencegahan korupsi**



kegiatan lain yang dipandang perlu dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah sesuai kesepakatan para pihak.

Contoh Realisasi Output/Manfaat dari Kegiatan PKS yang Telah Berjalan



- Beberapa Pemda **mendapat tambahan potensi dan tambahan realisasi penerimaan pajak daerah** dari hasil kegiatan pertukaran data dan pengawasan WP bersama (DJP dan Pemda).
- Pemda Peserta PKS **mendapat prioritas untuk diikuti dalam kegiatan Bimbingan Teknis Perpajakan Daerah** (antara lain kelas Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan penggalan potensi Pajak Daerah) yang diselenggarakan oleh DJPK.
- Pemda juga mendapatkan manfaat dari kegiatan peningkatan kapasitas/pendampingan yang diselenggarakan oleh **Kanwil DJP/KPP**, antara lain bimtek penilaian.



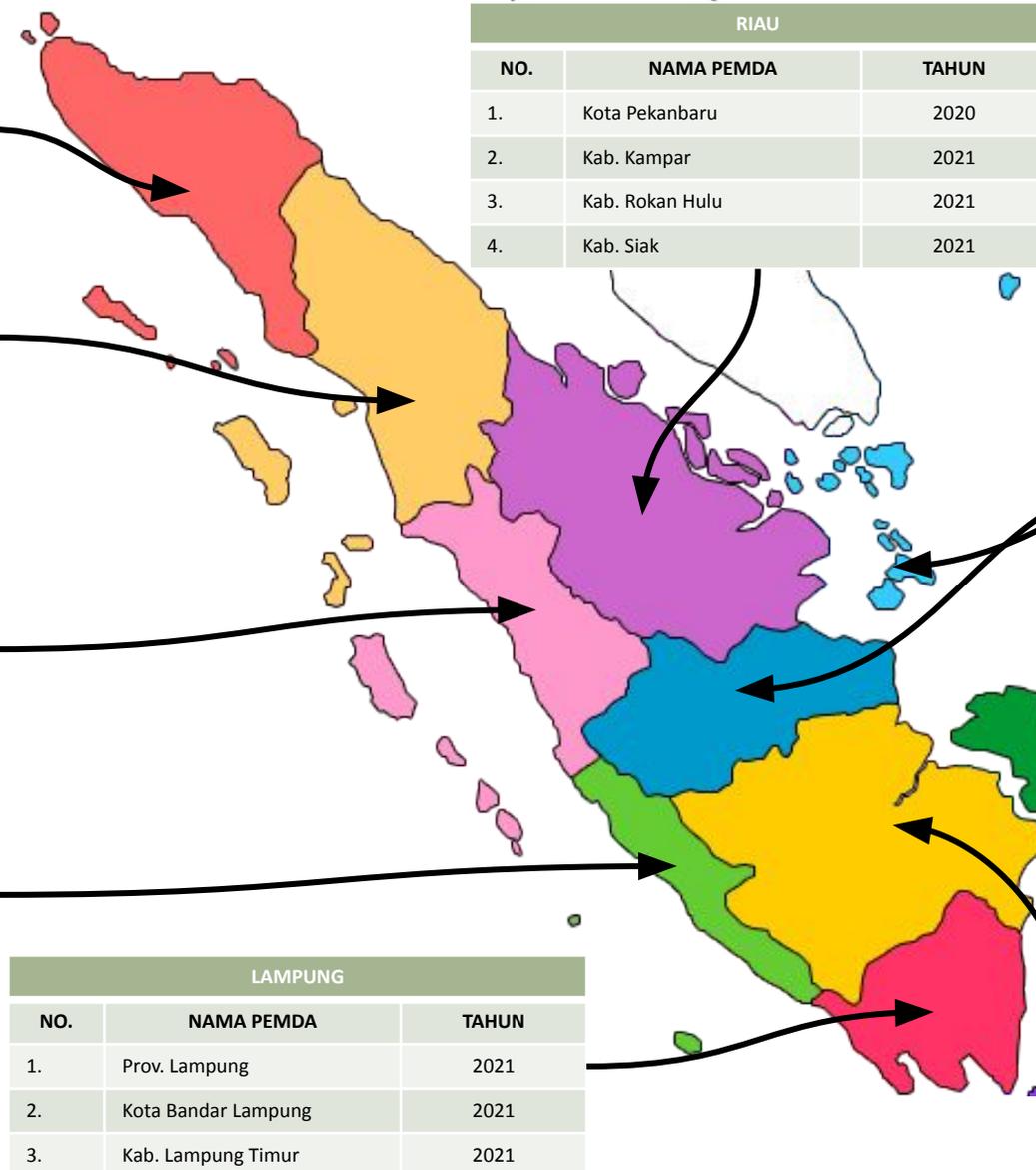
KEIKUTSERTAAN PKS – SUMATERA – 33 PEMDA

ACEH		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kota Banda Aceh	2020
2.	Kab. Aceh Besar	2020
3.	Kota Lhokseumawe	2021

SUMATERA UTARA		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
BELUM ADA		

SUMATERA BARAT		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kota Padang	2020
2.	Kota Bukittinggi	2020
3.	Kota Payakumbuh	2020
4.	Kota Sawahlunto	2020
5.	Kab. 50 Kota	2021
6.	Kota Padang Panjang	2021

BENGKULU		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
BELUM ADA		



RIAU		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kota Pekanbaru	2020
2.	Kab. Kampar	2021
3.	Kab. Rokan Hulu	2021
4.	Kab. Siak	2021

KEPULAUAN RIAU		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kota Batam	2019
2.	Kab. Bintan	2020
3.	Kab. Karimun	2020
4.	Kota Tanjung Pinang	2020
5.	Kab. Kepulauan Anambas	2021
6.	Kab. Natuna	2021

JAMBI		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kab. Tanjung Jabung Barat	2021
2.	Kab. Bungo	2021

BANGKA BELITUNG		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kota Pangkalpinang	2020
2.	Kab. Belitung	2020
3.	Kab. Bangka	2021
4.	Kab. Bangka Tengah	2021
5.	Kab. Belitung Timur	2021

SUMATERA SELATAN		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2021
2.	Kab. Banyuasin	2021
3.	Kota Prabumulih	2021
4.	Kab. Muara Enim	2021

LAMPUNG		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Prov. Lampung	2021
2.	Kota Bandar Lampung	2021
3.	Kab. Lampung Timur	2021

*Data per 25 Februari 2022



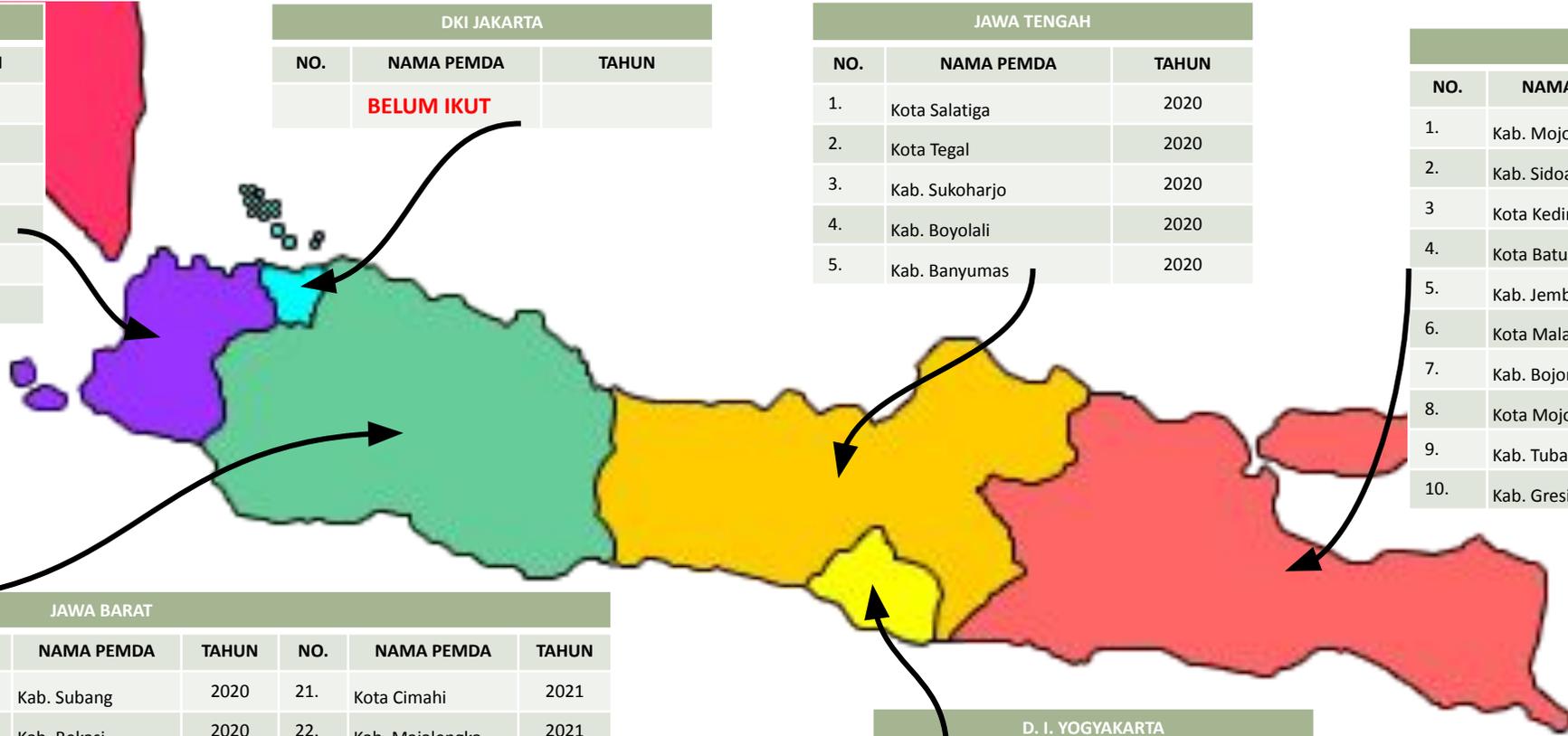
KEIKUTSERTAAN PKS – JAWA – 53 PEMDA

BANTEN		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kota Tangerang Selatan	2019
2.	Kab. Lebak	2020
3.	Kab. Pandeglang	2020
4.	Kota Tangerang	2021
5.	Kota Cilegon	2021
6.	Kab. Tangerang	2021

DKI JAKARTA		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
	BELUM IKUT	

JAWA TENGAH		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kota Salatiga	2020
2.	Kota Tegal	2020
3.	Kab. Sukoharjo	2020
4.	Kab. Boyolali	2020
5.	Kab. Banyumas	2020

JAWA TIMUR		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kab. Mojokerto	2020
2.	Kab. Sidoarjo	2020
3.	Kota Kediri	2020
4.	Kota Batu	2020
5.	Kab. Jember	2020
6.	Kota Malang	2020
7.	Kab. Bojonegoro	2020
8.	Kota Mojokerto	2020
9.	Kab. Tuban	2021
10.	Kab. Gresik	2021



JAWA BARAT								
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN	NO.	NAMA PEMDA	TAHUN	NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Provinsi Jawa Barat	2020	11.	Kab. Subang	2020	21.	Kota Cimahi	2021
2.	Kab. Sukabumi	2020	12.	Kab. Bekasi	2020	22.	Kab. Majalengka	2021
3.	Kota Bandung	2020	13.	Kab. Karawang	2020	23.	Kab. Cirebon	2021
4.	Kab. Ciamis	2020	14.	Kota Sukabumi	2020	24.	Kota Cirebon	2021
5.	Kab. Garut	2020	15.	Kota Depok	2020	25.	Kab. Kuningan	2021
6.	Kab. Pangandaran	2020	16.	Kota Bogor	2020	26.	Kota Bekasi	2021
7.	Kab. Purwakarta	2020	17.	Kab. Bandung Barat	2021			
8.	Kab. Sumedang	2020	18.	Kab. Tasikmalaya	2021			
9.	Kab. Bandung	2020	19.	Kota Banjar	2021			
10.	Kab. Indramayu	2020	20.	Kota Tasikmalaya	2021			

D. I. YOGYAKARTA		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kota Yogyakarta	2019
2.	Prov. D. I. Yogyakarta	2020
3.	Kab. Sleman	2020
4.	Kab. Kulon Progo	2021
5.	Kab. Bantul	2021
6.	Kab. Gunung Kidul	2021

*Data per 25 Februari 2022



KEIKUTSERTAAN PKS – KALIMANTAN – 39 PEMDA

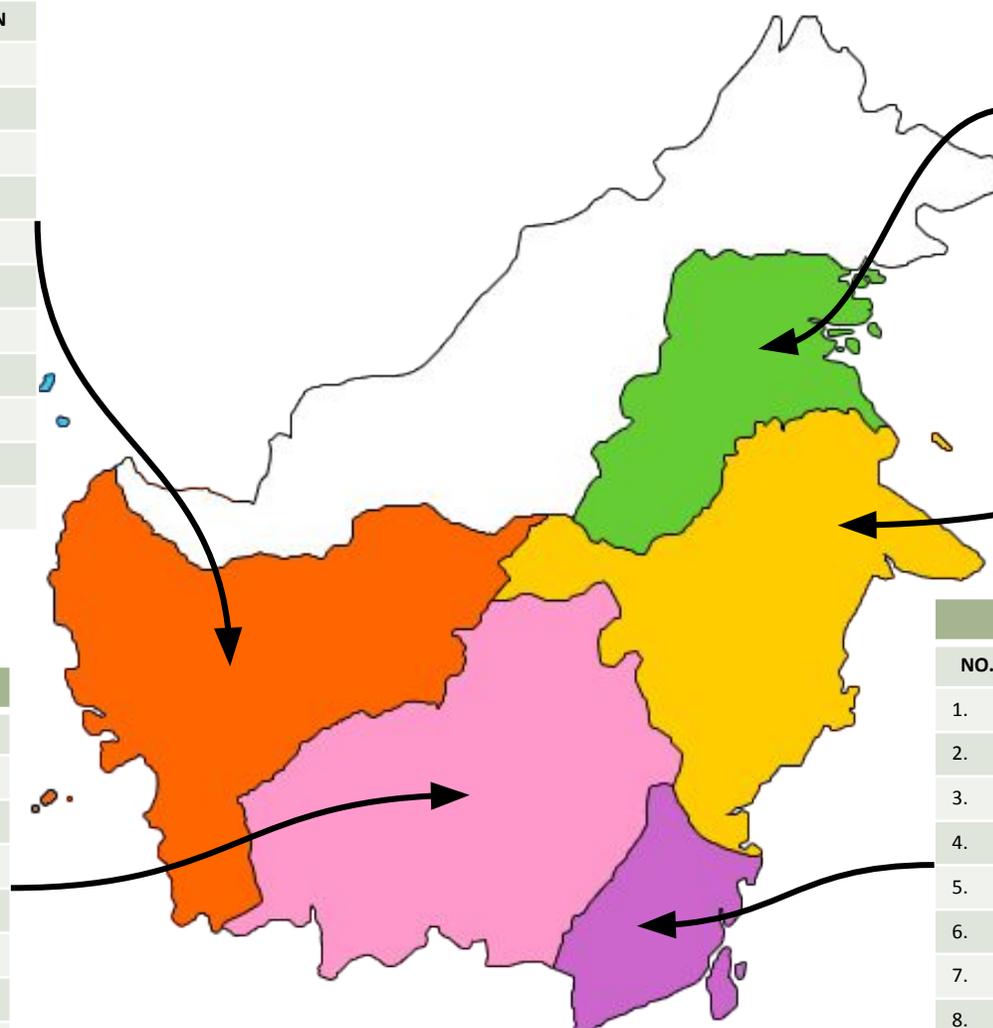
KALIMANTAN BARAT		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kab. Kubu Raya	2020
2.	Kota Pontianak	2020
3.	Kab. Bengkayang	2021
4.	Kab. Melawi	2021
5.	Kab. Sanggau	2021
6.	Kab. Landak	2021
7.	Kab. Mempawah	2021
8.	Kab. Sintang	2021
9.	Kab. Ketapang	2021
10.	Kab. Kapuas Hulu	2021
11.	Kota Singkawang	2021

KALIMANTAN UTARA		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kota Tarakan	2021
2.	Kab. Nunukan	2021
3.	Kab. Bulungan	2021
4.	Kab. Malinau	2021
5.	Kab. Tana Tidung	2021

KALIMANTAN TIMUR		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kota Balikpapan	2020
2.	Kota Samarinda	2020
3.	Kota Bontang	2021
4.	Kab. Paser	2021
5.	Kab. Kutai Barat	2021

KALIMANTAN TENGAH		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kab. Kotawaringin Barat	2021
2.	Kab. Kotawaringin Timur	2021
3.	Kab. Murung Raya	2021
4.	Kab. Pulang Pisau	2021
5.	Kab. Gunung Mas	2021
6.	Kab. Lamandau	2021
7.	Kab. Barito Utara	2021
8.	Kab. Katingan	2021

KALIMANTAN SELATAN		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kab. Tabalong	2020
2.	Kota Banjarmasin	2020
3.	Kab. Banjar	2021
4.	Kab. Tanah Laut	2021
5.	Kab. Tanah Bumbu	2021
6.	Kab. Hulu Sungai Utara	2021
7.	Kab. Hulu Sungai Tengah	2021
8.	Kab. Hulu Sungai Selatan	2021
9.	Kab. Barito Kuala	2021
10.	Kab. Tapin	2021



*Data per 25 Februari 2022



KEIKUTSERTAAN PKS – SULAWESI – 25 PEMDA

GORONTALO		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kota Gorontalo	2020
2.	Kab. Gorontalo	2021

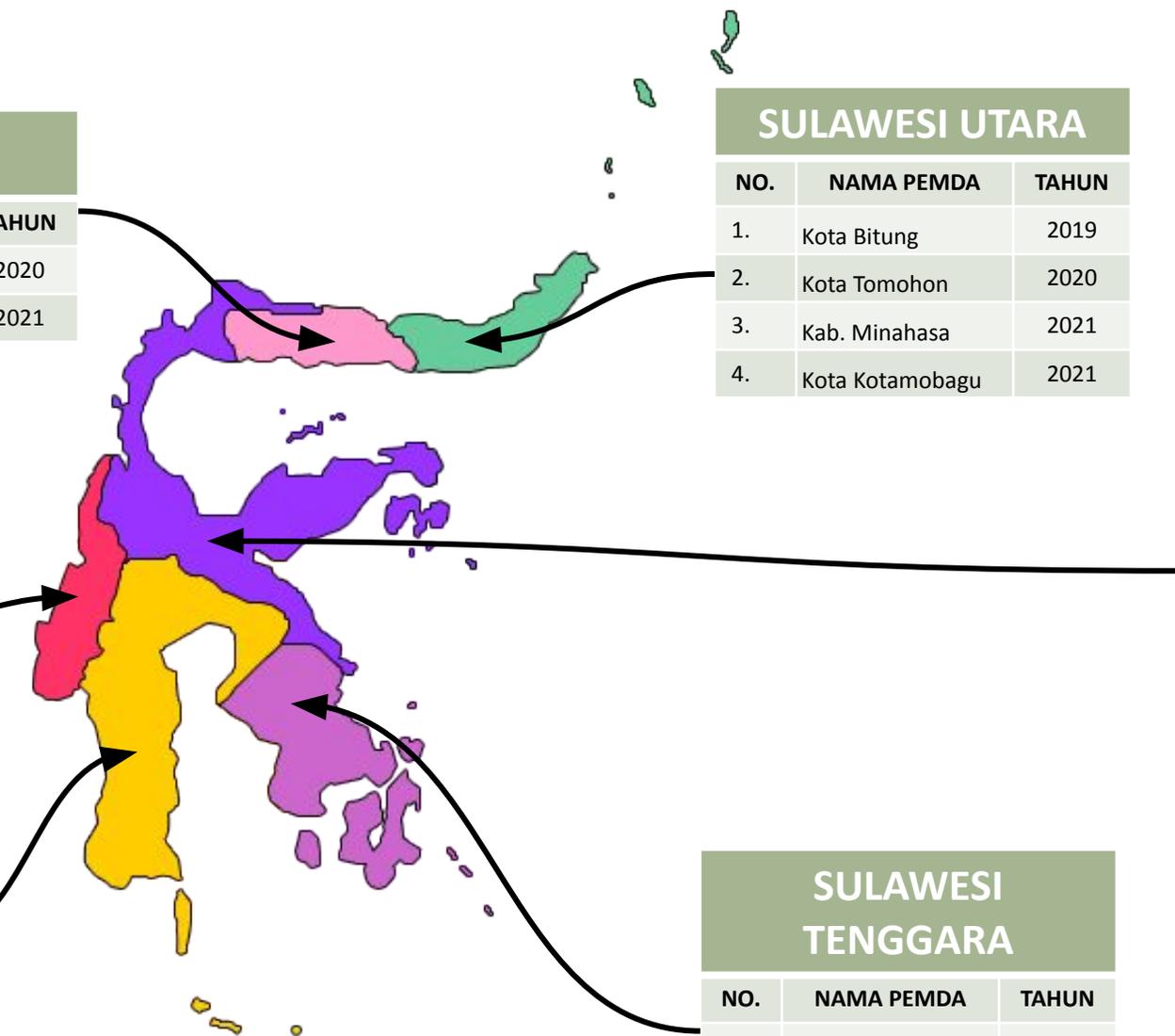
SULAWESI UTARA		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kota Bitung	2019
2.	Kota Tomohon	2020
3.	Kab. Minahasa	2021
4.	Kota Kotamobagu	2021

SULAWESI TENGAH		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Prov. Sulawesi Tengah	2020
2.	Kota Palu	2020
3.	Kab. Banggai	2020
4.	Kab. Banggai Kepulauan	2020
5.	Kab. Buol	2020
6.	Kab. Donggala	2020
7.	Kab. Morowali	2020
8.	Kab. Morowali Utara	2020
9.	Kab. Parigi Moutong	2020
10.	Kab. Poso	2020
11.	Kab. Sigi	2020
12.	Kab. Tojo Una-Una	2020
13.	Kab. Tolitoli	2020
14.	Kab. Banggai Laut	2021

SULAWESI BARAT		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kab. Mamuju	2020
2.	Kab. Pasangkayu	2021

SULAWESI SELATAN		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kota Makassar	2019
2.	Kab. Jeneponto	2021

SULAWESI TENGGARA		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kota Kendari	2020



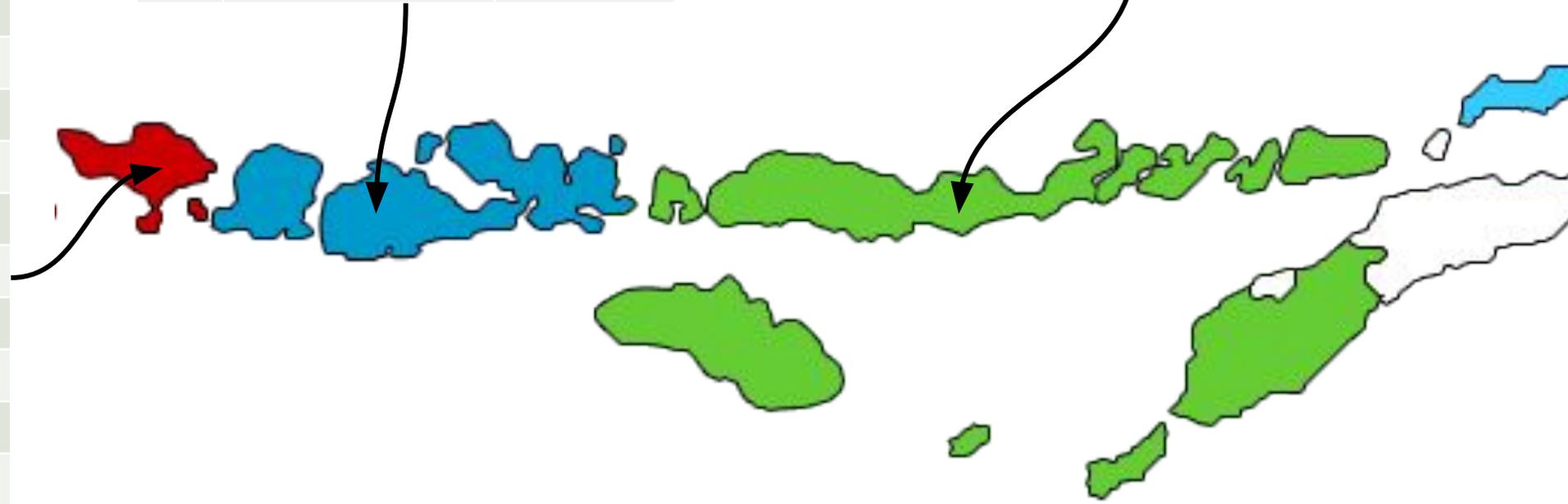
*Data per 25 Februari 2022

KEIKUTSERTAAN PKS – BALI & NUSRA – 15 PEMDA

BALI		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kota Denpasar	2019
2.	Kab. Jembrana	2020
3.	Kab. Klungkung	2020
4.	Kab. Bangli	2020
5.	Kab. Karangasem	2020
6.	Kab. Buleleng	2020
7.	Kab. Gianyar	2020
8.	Kab. Badung	2021
9.	Kab. Tabanan	2021

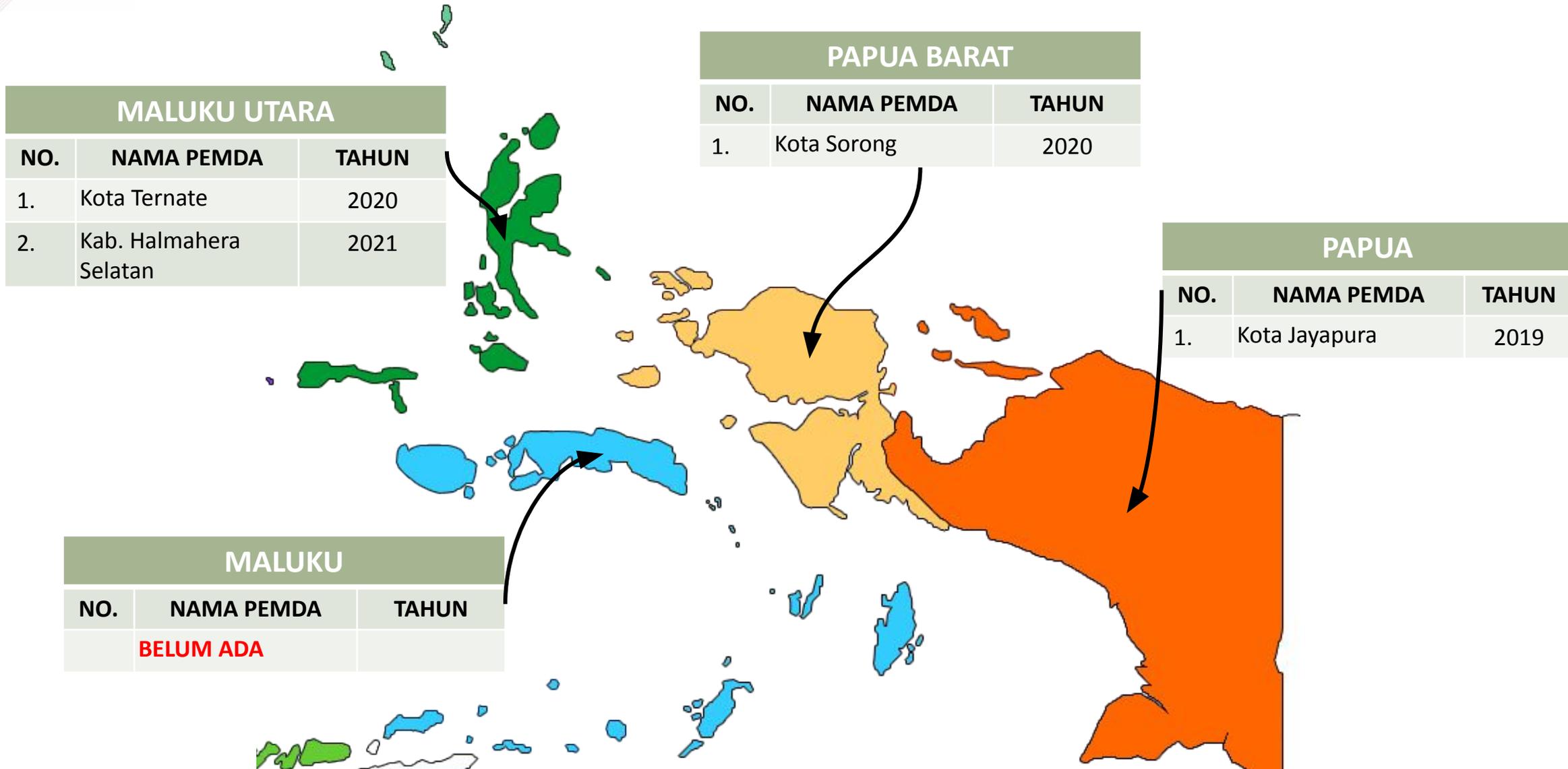
NTB		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kab. Lombok Tengah	2020
2.	Kab. Lombok Barat	2020
3.	Kab. Lombok Utara	2021

NTT		
NO.	NAMA PEMDA	TAHUN
1.	Kab. Alor	2021
2.	Kab. Manggarai Barat	2021
3.	Kab. Lembata	2021



*Data per 25 Februari 2022

KEIKUTSERTAAN PKS – MALUKU & PAPUA – 4 PEMDA



*Data per 25 Februari 2022



TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan

Kementerian Keuangan RI

